

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 2 No. 2 Tahun 2017
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

(Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow)

Erwin Fernando Tumbelaka¹

Michael Mantiri²

Sarah Sambiran³

Abstrak

Dewasa ini dalam membangun suatu desa harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat, tanpa adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Keterlibatan dimulai dari tahap pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil sampai pada evaluasi. Disetiap perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide pendapat kritik maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk pembangunan suatu desa sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa. Masyarakat melihat pembangunan di desa Ponompiaan masih belum terlaksana kondisi seperti itu menjadi masalah dan hambatan untuk pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pada pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus melibatkan diri dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan adalah sesuatu yang: dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pengertian merumuskan perencanaan pembangunan itu, tidak berarti bahwa ide-ide yang berkaitan dengan rumusan kegiatan dan cara mencapai tujuan hanya dilakukan sendiri oleh kelompok ini, akan tetapi mereka sekedar merumuskan semua ide-ide atau aspirasi yang dikehendaki oleh seluruh warga masyarakat melalui sesuatu mekanisme yang telah disepakati. Sedang perencanaan pembangunan di arus yang paling bawah disalurkan melalui pertemuan kelompok atau permusyawaratan pada lembaga yang terbawah, secara formal maupun informal. Dewasa ini, dalam membangun suatu desa harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat. Seperti kondisi yang terjadi di desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan secara bersama, namun pada kondisi yang sebenarnya terjadi di Desa Ponompiaan masyarakat belum di ikut sertakan atau belum terlibat dalam kebijakan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa. Padahal dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud di lakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan dan atau keterlibatan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi Publik, artinya disini kegiatan partisipatif yang bertujuan

untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini musyawarah antar warga desa dan pemerintah desa untuk mencari cara yang terbaik memecahkan suatu persoalan. Tetapi yang terjadi dilapangan tidaklah demikian relasi antar warga desa Ponompiaan dan pemerintah tidak berjalan dgn baik. Musyawarah Kemitraan, yaitu pembicaraan atau perbincangan antara masyarakat dan pemerintah desa mengenai program, perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. namun apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan masyarakat seakan-akan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau pembicaraan yang tadi disebutkan. Penyampaian Aspirasi, dengan hak ini menjadi terbuka kesempatan bagi masyarakat desa menyampaikan aspirasi saran dan pendapat lisan atau tertulis kepada pemerintah. Pelaksana pembangunan tanpa ada keragu-raguan. Namun selama ini ketika ada warga desa Ponompiaan menyampaikan aspirasi atau saran biasanya diabaikan atau hanya didengar saja dan tidak diterima. Pengawasan, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya hak ini, tidak ada lagi alasan-alasan bagi penyelenggaraan pemerintah desa pelaksana pembangunan desa untuk tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya walaupun ada hak masyarakat untuk bertanya maupun meminta informasi, biasanya tidak mendapat layanan atau respon seperti yang diharapkan. Tentu keadaan ini sangat tidak menguntungkan karena masyarakat di desa Ponompiaan

sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk pembangunan desa. Masyarakat melihat pembangunan di desa Ponompiaan masih belum terlaksana.

Kondisi seperti itu menjadi masalah dan hambatan untuk pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pada pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya masyarakat juga harus melibatkan diri dalam pembangunan desa, masyarakat sebagai salah satu subsistem suatu desa harus melibatkan diri dalam proses pembangunan desa keterlibatan itu dimulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada evaluasi. Ketika perencanaan serta pelaksanaan sedang berjalan tentunya pengawasan atau kontrol berupa saran atau kritik dari masyarakat sangat penting guna mengawasi jalannya suatu program pembangunan. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil dari pembangunan belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat dan belum tercapainya kesejahteraan yang ada di desa oleh karena itu peran serta masyarakat merupakan faktor yang penting dalam pembangunan desa.

Disetiap perencanaan pembangunan diperlukan adanya suatu kontribusi berupa pemikiran ide-ide, pendapat kritik, maupun saran secara sukarela dari masyarakat untuk pembangunan suatu desa sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya

suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau transparansi dari pemerintah desa sehingga masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa.

Tinjauan Pustaka

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R.A.Santoso Sastropoetro (2009:13) sebagai berikut: "Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Menurut Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2005: 127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara. Menurut Davis dalam Sastropoetro (2009:16-18) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.
2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perang-sang secara terbatas.
3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatian-nya.
4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk ber-partisipasi dalam arti kata yang bersangkutan

- me-miliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.
5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi tim-bal balik.
 6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 7. Adanya kebebasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

Todaro (2006:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa: 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan: a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain. c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain. Menurut Gant dalam Suryono (2005:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya

adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2005:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal secara menetap maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan yang terutama tergantung pada sektor pertanian. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Sementara itu Koentjaraningrat (2008:162), mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap sesuatu tempat ia tidak meberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus tergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain artinya masyarakat desa sebagai komunitas kecil itu dapat saja memiliki ciri-ciri aktifitas ekonomi yang beragam. Menurut Bintarto Desa

(2006:11) adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:09) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.

Fokus penelitian dimaksudkan guna memperoleh ruang lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat luas atau kurang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Effendi (2005:101) Partisipasi Masyarakat adalah kesediaan masyarakat untuk ikut terlibat secara fisik maupun emosional serta bertanggungjawab dalam suatu kegiatan. Jadi partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan. Fokus penelitian pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu dengan indikator empat partisipasi :

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil
- 4) Partisipasi dalam evaluasi

Informan Penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun pemilihan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Informan Kunci yaitu : Ketua BPD dan Masyarakat di Desa Ponompiaan (9 orang), Informan Pendukung : pemerintah desa (6 orang) dan Sangadi, Jumlah keseluruhan informan adalah 17 orang

Hasil Penelitian

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani

masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi berarti keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih dari pada sekedar kegiatan fisik semata. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan akan terus menerus tapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan adanya partisipasi masyarakat, partisipasi dalam pembangunan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Partisipasi juga berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif, dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pembangunan pada umumnya mempunyai tujuan demi kesejahteraan masyarakat demi menciptakan situasi kondisi yang memberikan kekuatan, kemampuan masyarakat dalam melaksanakan tahap pembangunan yang lebih lanjut. Adanya keikutsertaan dari masyarakat atau partisipasi masyarakat ternyata merupakan salah satu unsur penting sebagai penunjang pelaksanaan

pembangunan desa dan mempunyai prospek positif dalam rangka pemerataan kualitas hidup terutama dalam proses memajukan diri atau pribadi dalam penyebaran proses pembangunan. Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidaklah semata-mata didasarkan kepada pemerintah saja tetapi melainkan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan otonomi daerah maka akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengikuti proses pembangunan yang ada di desa tanpa perlu Datang kepada pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam suatu pembangunan, dalam proses pembangunan tidaklah hanya pemerintah yang berperan tetapi keikutsertaan masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dimana ketika masyarakat ambil bagian dalam suatu pembangunan akan merasa puas nanti ketika melihat juga ikut merasakan hasilnya dan tujuan dari pada pembangunan itu akan terjawab. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini dalam membangun suatu desa harus lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat, seperti kondisi yang terjadi di desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan secara bersama selanjutnya partisipasi masyarakat di Desa Ponompiaan berupa

pikiran, tenaga, keahlian, barang dan uang adalah unsur yang diperlukan dalam melakukan program pembangunan desa. Oleh Karena itu harus melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pengawasan meskipun hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menyadari keikutsertaan dalam pembangunan itu penting. Walaupun hambatan partisipasi dari masyarakat itu ada, dikarenakan masyarakat desa ponompiaan memiliki pekerjaan masing-masing. Tapi juga disebabkan karena masyarakat merasa masa bodoh atau hanya diam tdk memberi pikiran atau saran kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan. Dalam setiap pembangunan desa, masyarakat juga mempunyai hak dalam memberikan suatu kontribusi pemikiran atau ide-ide ataupun pendapat serta kritikan yang membangun terhadap program pembangunan lebih khususnya jalan disetiap dusun yang ada di desa Ponompiaan. Dalam hal proses pembuatan keputusan yang diadakan di desa, belum maksimal karena masyarakat belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan terkendala waktu dan kegiatan lainnya. Sebenarnya dalam pembangunan ini dapat berjalan dengan baik apabila keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, karena masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika apabila terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut demi memenuhi kebutuhan mereka, dengan adanya sumbangan pikiran dalam bentuk usulan saran masukan dana tenaga, dan lain sebagainya maka hasil

pembangunan ini akan memberi manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat ini adalah salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan. Namun partisipasi masyarakat masih rendah apalagi dalam adanya rapat sangat minim dalam arti sedikit masyarakat yang hadir dalam pengambilan keputusan, pada tahap perencanaan tingkat kehadiran masyarakat dalam rapat hanya sedikit. Walaupun ada masyarakat yang tidak ikut mereka menganggap /menerima bahwa apapun yang menjadi keputusan dari pemerintah desa itu untuk kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan hakekat pengertian pembangunan desa yaitu perencanaan pembangunan dari oleh dan untuk masyarakat desa. Desa adalah subjek pembangunan namun dalam pelaksanaannya masih perlu bimbingan dan bantuan pemerintah yang lebih tinggi (Marbun,2009;12). Melalui proses seperti ini keinginan-kinginan masyarakat desa dapat tersalurkan. Dalam hal ini Sangadi sebagai pimpinan pemerintahan merupakan penanggung jawab dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, untuk itu Sangadi harus mampu menggerakkan seluruh kalangan masyarakat desa untuk melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Untuk menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa, diperlukan suatu arahan dalam bentuk rencana kegiatan dari pelaksanaan pembangunan. Dan dalam hal mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan.

Cohen dan Uphoff (2006) menyatakan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dibedakan menjadi, pertama manfaat material, seperti peningkatan pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi. Kedua manfaat sosial, pendidikan kesehatan dan jasa-jasa lain. Ketiga manfaat individual seperti pengembangan diri kekuasaan politik, dan kepercayaan umum bahwa semua orang dapat mengendalikan kuasanya. Kemudian Ndraha (2006) menyatakan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan berarti menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik bersama, menggunakan dan memanfaatkan hasil pembangunan memelihara secara rutin dan sistematis tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak ada program pembangunan, lain dari pemerintah untuk kemajuan desa. Mengatur penggunaan pemanfaatannya dan juga pengamannya terkait pembangunan yang telah terlaksana. Oleh karena itu dari hasil yang telah dicapai dalam hal ini pembangunan desa, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan guna menunjang segala kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pembangunan desa memudahkan masyarakat untuk beraktifitas misalnya jalan usaha tani sudah menjadi bagus membantu masyarakat dalam transportasi ke pertanian. Artinya pembangunan itu harus dapat dirasakan atau masyarakat dapat memetik hasil dari proses yang sudah berjalan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai pada pemanfaatan. Setiap usaha bersama

manusia dalam pembangunan misalnya bagaimanapun ditunjukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakatnya. Oleh sebab itu, anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, pembangunan dapat berjalan terus-menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda jika masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Jadi pendapat dari masyarakat desa ponompiaan menjelaskan tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di desa masih belum terlaksana bagaimana untuk merasakan manfaat atau hasil sedangkan program pembangunan belum terlaksana. Suatu cara bagaimana kita melihat, menduga, memperkirakan dan menguraikan serta memperjelaskan apa yang menjadi masalah dalam pembangunan. Dengan maksud untuk mempercepat upaya pembangunan desa. Masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan karena adanya kesadaran bahwa pembangunan yang di programkan merupakan kebutuhan dari semua masyarakat untuk dapat merasakan manfaat dan hasilnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik. Untuk terjadinya perubahan yang dimaksud, dari awal hingga saat ini hasil yang diharapkan masih jauh. Bagaimanapun usaha pemerintah jika tanpa partisipasi dari segenap anggota masyarakat perubahan yang diinginkan tidak akan terwujud. Rendahnya tingkat Pendidikan dan pendapatan masyarakat membuat partisipasi terhadap pembangunan sedikit/rendah. Dalam keadaan susah masyarakat sulit mengambil keputusan mana yang harus

dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama. Gotong-royong yang mungkin boleh jadi akan membawa dampak yang lebih besar. Partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Partisipasi memberi perluasan kesempatan kerja kesediaan dan kemampuan bekerja dari anggota masyarakat yang dari dalamnya sebagai unsur dalam pembangunan desa sehingga akan menimbulkan rasa percaya diri. Jika pembangunan dapat terlaksana maka manfaat yang dapat diperoleh masyarakat yaitu hasil pembangunan dipastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menyediakan dasar-dasar kekuatan local dan organisasi masyarakat. Secara moral masyarakat merasa memiliki sehingga terjaga kelestariannya dan merupakan bagian dari pembangunan yang dilaksanakan bersama pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum, dan sarana dan prasarana sosial) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam menikmati atau menggunakan hasil-hasil pembangunan desa. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Setiap anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan juga sangat penting yang dimana keterlibatan masyarakat dimaksud dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam bentuk merawat/memelihara pembangunan yang ada di desa Ponompiaan. Kepedulian masyarakat masih dianggap kurang karena masih ada masyarakat

yang beranggapan masa bodoh dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Tahap evaluasi dianggap penting, sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan baik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil dari proyek suatu pembangunan. Masyarakat harus bersikap kritis apakah perencanaan suatu pembangunan sesuai yang diharapkan. Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat memperbesar peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Selain agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang baik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangun sangat diperlukan. Tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan, artinya meberikan indikasi adanya kemamouan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemauan dan kemampuan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Menciptakan umpan balik antara masyarakat dan

pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dalam pembangunan.

Sudah umum diketahui bahwa setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama, hanya dapat dilihat berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini sudah sepatasnya masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Identifikasi masalah pembangunan adalah suatu cara bagaimana kita melihat, memperkirakan dan menjelaskan mengenai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan ada atau tidaknya, jadi pembangunan sangat penting dilakukan dengan melibatkan atau mengikut sertakan masyarakat sebagai penilai dari pada pembangunan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan sikap positif terhadap pemerintah, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan memantau hasil pelaksanaan pembangunan apakah sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini masyarakat harus bersikap kritis terhadap apa yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah tanpa adanya evaluasi dari masyarakat bisa terjadi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat harus menyikapi apakah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan ditetapkan? Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan

penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi yaitu langkah yang positif dari masyarakat kepada pemerintah supaya melihat apa yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Supaya kedepannya pemerintah bisa memantapkan lagi program pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pembangunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. Menurut Mely G.Tan dan Koentjaraningrat (soebroto, 1998) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa yaitu hasil usaha harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat, usaha pembaharuan tersebut

harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan budaya dan norma-norma yang masih berlaku.

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam suatu proses pembangunan. Oleh sebab itu tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat pembangunan tidak akan berhasil. Partisipasi dalam pembangunan merupakan hak demokrasi masyarakat dalam pembangunan guna menimbulkan rasa percaya diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, apabila dalam pelaksanaan pembangunan yang terlibat hanya pemerintah desa saja melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.
3. Dalam setiap program pembangunan yang telah di rencanakan pemerintah seharusnya pemerintah desa wajib mensosialisasikan kepada masyarakat agar ada rasa saling kepercayaan dari masyarakat karena transparansi oleh pemerintah guna meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi suatu program pembangunan supaya masyarakat ada keinginan untuk berpartisipasi.

Saran

1. Kepada masyarakat agar supaya lebih meningkatkan lagi partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa terutama menghadiri rapat atau

pengambilan keputusan bersama pemerintah desa.

2. Kepada masyarakat dalam setiap program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa agar sebaiknya memberikan tanggapan mengkritisi atau juga memberi masukan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik seperti apa yang sudah di rencanakan dari awal. Dan juga kepada seluruh masyarakat lebih meningkatkan lagi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, proses pelaksanaan, dalam memanfaatkan hasil pembangunan dan sampai pada evaluasi atau penilaian.
3. Kepada pemerintah, supaya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan, proses pelaksanaan dan dalam memanfaatkan hasil sampai pada evaluasi menjadi maksimal atau baik harus lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu program pembangunan seperti apa yang akan pemerintah buat, supaya ada saling keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat desa Ponompiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Jakarta: Prenada Media Group
- Bintarto, 2006. "Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya." Jakarta: Galia Indonesia
- Kansil, C.S.T, 2005. "Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi" Yogyakarta: Insintpress.
- Cohen, 2006. "Rural Development Participation" Cornell University RDCCIS: New York
- Davis, K. 2006. "Perilaku Dalam Organisasi" Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga

- Isbandi, R.A. 2007. "Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan." Depok: FISIP UI Press
- Riwu K, J. 2005. "Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastropoetro, Santoso R.A. 2009. "Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional." Bandung: Alumni.
- Siagian S.P, 2008. "Administrasi Pembangunan," Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soetomo, 2008. "Strategi - Strategi Pembangunan" Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D" Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I.N. 2010. "Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan Pemberdayaan Interaksi dan Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia" Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suryono, A. 2005. "Teori dan Isu Pembangunan." Malang: Universitas Malang Press.
- Todaro, M.P. 2006. "Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga." Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H.A.R. 2006. "Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat madani Indonesia" Bandung: PT Remaja Rosdakarya